

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan manajemen arsip digital melalui aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem kearsipan elektronik tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip. Proses penciptaan, pencatatan, disposisi, penyimpanan, hingga temu kembali arsip menjadi lebih cepat, sistematis, dan terdokumentasi secara otomatis. Penerapan ini juga telah mengacu pada regulasi nasional yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dan mendukung reformasi birokrasi. Dari sisi keamanan dan akuntabilitas, penggunaan hak akses berbasis jabatan, pencatatan log aktivitas, serta Tanda Tangan Elektronik mampu meningkatkan perlindungan terhadap arsip digital dan meminimalkan risiko kehilangan maupun penyalahgunaan dokumen.

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem ini belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, jaringan internet yang belum stabil di beberapa unit, serta kemampuan sumber daya manusia yang belum merata dalam mengoperasikan aplikasi. Selain itu, konsistensi penggunaan klasifikasi dan kode surat masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan arsip semakin tertib dan terstandarisasi. Secara keseluruhan, penerapan manajemen arsip digital di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah berada pada arah yang tepat dan menunjukkan komitmen terhadap transformasi digital pemerintahan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat implementasi SRIKANDI melalui peningkatan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan bagi seluruh pegawai, sehingga kemampuan penggunaan sistem dapat merata di setiap unit kerja. Penguatan infrastruktur teknologi informasi, seperti peningkatan kualitas jaringan internet, server, serta perangkat pendukung, juga perlu menjadi prioritas agar operasional sistem berjalan lebih optimal.

Selain itu, diperlukan penegakan standar operasional prosedur yang konsisten, khususnya dalam hal klasifikasi arsip, penggunaan kode surat, serta penyusutan arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip. Monitoring dan evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan sistem sekaligus mengidentifikasi kendala secara dini. Di samping aspek teknis, penguatan budaya kerja berbasis digital dan komitmen pimpinan sangat penting agar transformasi kearsipan tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja yang modern, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.